

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FARIHIN
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 7855

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	360.000.000
1. Tanah Seluas 24.900 m2 di KAB / KOTA GRESIK, WARISAN Rp. 300.000.000		
2. Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA GRESIK, WARISAN Rp. 25.000.000		
3. Tanah Seluas 125 m2 di KAB / KOTA BANGKALAN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	185.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MIO J (DUPLIKASI, TERULANG = ANGKA 3 DI ATAS) SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA RUSH (DUPLIKASI, TERULANG = ANGKA 2 DI ATAS) MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA MIO J SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
5. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
6. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----

E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	168.272.382
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	716.172.382
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	716.172.382

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.